

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA KAWALI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Indra Muhammad Faishal¹, Asep Nurwanda², Erlan Suwarlan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia¹⁻³

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2026

Revised Juli 2026

Accepted Juli 2026

Available online Juli 2026

Email:

faisalindramuhammad@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, anggota Pokdarwis, dan masyarakat pelaku usaha. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan triangulasi. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal telah dilaksanakan melalui pendekatan Community-Based Tourism (CBT) yang meliputi partisipasi masyarakat, pengembangan berbasis kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, konservasi lingkungan dan budaya, pembentukan kemitraan, diversifikasi pendapatan, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala pada aspek regulasi, koordinasi antarlembaga, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemerataan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan desa, peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pengembangan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar pengembangan desa wisata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, desa wisata, Community-Based Tourism.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menyebutkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia sekaligus membuka jutaan lapangan pekerjaan. Selain memberikan manfaat ekonomi, pembangunan sektor pariwisata juga memiliki peran dalam pelestarian budaya, penguatan identitas lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan pada pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people-centered development) dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Nurwanda (2018), kegiatan pariwisata pada hakikatnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas industri pariwisata. Pariwisata tidak hanya dipandang sebagai kegiatan rekreasi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya usaha mikro dan ekonomi kreatif. Sejalan dengan itu, Zitri et al. (2022) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata berbasis Community-Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Di Indonesia, pembangunan desa wisata memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal sesuai karakteristik wilayahnya. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan melalui prinsip partisipasi masyarakat, pemberdayaan, serta pengembangan potensi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Pengembangan desa wisata juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kedelapan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta tujuan kesebelas mengenai pembangunan kota dan permukiman yang berkelanjutan. Oleh karena itu, desa wisata dipandang sebagai salah satu strategi pembangunan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan (Annisya et al., 2022).

Perkembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat. Program Desa Wisata Nusantara yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong setiap desa untuk mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan setiap desa wisata tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam menyusun strategi pemberdayaan masyarakat, membangun kelembagaan yang kuat, serta menciptakan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Rahmah dan Raharjo (2021) menjelaskan bahwa berbagai desa wisata di Indonesia masih menghadapi permasalahan berupa rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan lokal, serta kurang optimalnya strategi pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan wisata cenderung berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan penguatan kapasitas masyarakat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang secara aktif mengembangkan desa wisata sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Kabupaten Ciamis menjadi salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata sejarah, budaya, dan alam yang cukup besar sehingga pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah (Utami & Mulyono, 2023). Salah satu desa yang memiliki potensi tersebut adalah Desa Kawali. Desa ini memiliki berbagai objek wisata sejarah dan budaya, seperti Situs Astana Gede Kawali yang merupakan peninggalan Kerajaan Galuh, serta berbagai potensi wisata budaya dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat. Keberadaan potensi tersebut diperkuat oleh Peraturan Bupati Ciamis Nomor 68 Tahun 2020 tentang Desa Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Usaha Pariwisata, serta Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 mengenai pengembangan kawasan pariwisata.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Kawali dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan desa wisata belum berjalan secara optimal. Permasalahan pertama terlihat dari belum tersusunnya Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan desa wisata sehingga belum tersedia landasan hukum yang jelas mengenai kelembagaan pengelola, pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan, maupun pengalokasian anggaran pengembangan wisata. Kondisi tersebut mengakibatkan pengelolaan desa wisata masih berlangsung secara parsial dan belum memiliki arah kebijakan yang terintegrasi.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Koordinasi antar pemangku kepentingan masih belum berjalan secara efektif sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program wisata belum dilaksanakan secara kolaboratif. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam

pengembangan desa wisata masih terbatas dan belum mampu membangun rasa memiliki (sense of belonging) terhadap keberlanjutan program wisata desa. Menurut Gautama et al. (2020), keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kolaborasi kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memperluas akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan jaringan kerja sama.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat Desa Kawali juga belum berkembang secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perdagangan skala kecil sehingga potensi ekonomi dari sektor pariwisata belum memberikan manfaat yang merata. Rendahnya intensitas pelatihan, pendampingan usaha, serta akses terhadap permodalan menyebabkan inovasi produk wisata dan ekonomi kreatif masih terbatas. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rizki et al. (2021) yang menjelaskan bahwa pembangunan desa wisata tidak akan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan apabila tidak disertai dengan proses pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kreativitas masyarakat lokal.

Dari perspektif sosial budaya, pengembangan desa wisata juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan kebutuhan pengembangan destinasi wisata. Sebagian masyarakat masih memiliki kekhawatiran bahwa aktivitas pariwisata dapat menggeser nilai-nilai budaya dan identitas lokal apabila tidak dikelola secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan Community-Based Tourism (CBT) menjadi penting karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak menentukan arah pengembangan wisata sesuai dengan nilai-nilai lokal yang dimiliki (Junaid et al., 2022). Sari dan Pinasti (2023) juga menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sehingga kegiatan pariwisata dipandang sebagai media pelestarian budaya sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian mengenai pengembangan desa wisata telah banyak dilakukan. Penelitian Gautama et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta dukungan pemerintah. Penelitian Junaid et al. (2022) menekankan pentingnya pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sementara itu, penelitian Yuditha dan Iskandar (2024) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis budaya. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek pengembangan desa wisata secara umum, sedangkan kajian mengenai strategi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat lokal melalui pendekatan Community-Based Tourism pada desa wisata berbasis sejarah dan budaya masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), khususnya dalam memahami bagaimana strategi pemerintah desa diterapkan untuk membangun partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, serta mengoptimalkan potensi wisata berbasis kearifan lokal di Desa Kawali.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis dengan menggunakan perspektif Community-Based Tourism (CBT). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai strategi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pengembangan desa wisata yang partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau fasilitas, tetapi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi lokal. Strategi pemberdayaan mencakup kebijakan, program, serta tindakan nyata yang dirancang untuk mendorong masyarakat agar mampu berinisiatif, berinovasi, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemerintah desa dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, motivator, sekaligus katalisator yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan (Raharjo, 2021). Sebagaimana ditegaskan oleh Raharjo (2021), efektivitas pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kemampuan aparat desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta membangun komunikasi yang inklusif dan kolaboratif. Hapsari dan Patilaiya (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi potensi, mengelola sumber daya, serta mengambil keputusan secara mandiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan itu, Rappaport (1995) menyatakan bahwa pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan individu dan kelompok untuk memperoleh kontrol terhadap kehidupan dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Strategi Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Partisipatif

Strategi pemerintahan desa merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi lokal, membangun kelembagaan, serta menggerakkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, tata kelola pemerintahan desa harus berorientasi pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan kolaboratif. Raharjo (2021) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan desa yang baik ditandai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Selain itu, Yulianingrum, Kurniawati, dan Lestari (2023) menjelaskan bahwa pemerintahan partisipatif di era digital menuntut pemerintah desa untuk mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan desa. Oleh karena itu, strategi pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial masyarakat dan kelembagaan lokal.

Teori Pengembangan Desa Wisata Berbasis *Community-Based Tourism* (CBT)

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses kegiatan wisata, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun penerima manfaat langsung. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap model pariwisata konvensional yang sering kali hanya menguntungkan pihak luar tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. CBT mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan agar kegiatan wisata tidak merusak ekosistem sosial maupun alam yang menjadi sumber daya utama masyarakat (Zitri, 2024). Menurut Zitri (2024), terdapat delapan pilar utama dalam implementasi CBT, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengembangan wisata mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
2. Strategi berbasis kearifan lokal, yaitu pemanfaatan nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam pengembangan destinasi wisata.
3. Pengembangan kapasitas masyarakat, melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan wisata.
4. Konservasi lingkungan dan budaya, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal.
5. Pembentukan kemitraan, melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan pihak terkait lainnya.
6. Diversifikasi pendapatan, dengan mengembangkan berbagai usaha wisata yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
7. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan, yang mendukung aktivitas wisata tanpa merusak lingkungan.
8. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan, untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Junaid, et. al. (2022) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan harus mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta keseimbangan pembangunan. Sementara itu, Gautama, Hidayat, dan Suryana (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam memfasilitasi pelatihan, membuka akses permodalan, serta membangun jejaring kerja sama lintas sektor. Penelitian Annisya', Rahmah, dan Raharjo (2022) juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Kawali, yang ditandai dengan belum adanya regulasi desa wisata, belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, Pokdarwis, dan masyarakat, serta masih rendahnya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Berdasarkan pendekatan Community-Based Tourism (CBT) menurut Zitri (2024), strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal ditentukan oleh partisipasi masyarakat, strategi berbasis kearifan lokal, pengembangan kapasitas masyarakat, konservasi lingkungan dan budaya, pembentukan kemitraan, diversifikasi pendapatan, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, optimalnya strategi pemerintah desa pada delapan aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan mewujudkan pengembangan Desa Wisata Kawali yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pada kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Kawali dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata berbasis Community-Based Tourism (CBT).

Penelitian dilaksanakan di Desa Kawali, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, pengurus Pokdarwis, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, dan masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Menurut Sugiyono (2023), purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2021).

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis difokuskan pada delapan indikator Community-Based Tourism (CBT) menurut Zitri (2024), yaitu partisipasi masyarakat, strategi berbasis kearifan lokal, pengembangan kapasitas masyarakat, konservasi lingkungan dan budaya, pembentukan kemitraan, diversifikasi pendapatan, pengembangan infrastruktur berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, diketahui bahwa strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata berdasarkan pendekatan Community Based Tourism (CBT) menurut Zitri (2024) telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari delapan indikator Community Based Tourism (CBT) yang masih memerlukan penguatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada indikator partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa Kawali telah berupaya melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, pembentukan Pokdarwis, kegiatan gotong royong, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan desa wisata. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih didominasi oleh kelompok tertentu sehingga belum seluruh masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program desa wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator partisipasi masyarakat menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara optimal. Menurut Raharjo (2021), keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kawali perlu meningkatkan sosialisasi, memperluas ruang partisipasi masyarakat, serta memperkuat kapasitas Pokdarwis agar masyarakat semakin aktif dalam pengembangan desa wisata.
2. Pada indikator strategi berbasis kearifan lokal, Pemerintah Desa Kawali telah memanfaatkan potensi budaya, sejarah, dan tradisi lokal sebagai daya tarik wisata, seperti pengembangan Situs Astana Gede Kawali, Kampung Nila, serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya. Namun demikian, pemanfaatan kearifan lokal belum dilakukan secara maksimal karena masih diperlukan inovasi dalam pengembangan produk wisata dan promosi budaya lokal agar memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator strategi berbasis kearifan lokal menurut Zitri (2024) belum sepenuhnya optimal. Menurut Junaid et al. (2022), pengembangan desa wisata harus berorientasi pada pelestarian identitas lokal sebagai daya tarik utama destinasi wisata. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan inovasi wisata berbasis budaya serta meningkatkan promosi potensi lokal secara berkelanjutan.
3. Pada indikator pengembangan kapasitas masyarakat, Pemerintah Desa Kawali bersama Pokdarwis telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan

kepada masyarakat serta pelaku usaha wisata untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola desa wisata. Namun demikian, pelaksanaan pelatihan belum menjangkau seluruh masyarakat dan masih memerlukan peningkatan frekuensi serta keberlanjutan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pengembangan kapasitas masyarakat menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara maksimal. Menurut Hapsari dan Patilaiya (2022), pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperluas program pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Pada indikator konservasi lingkungan dan budaya, Pemerintah Desa Kawali bersama Pokdarwis telah melaksanakan berbagai upaya pelestarian melalui penyusunan aturan kebersihan kawasan wisata, kegiatan kerja bakti, penghijauan, pemeliharaan fasilitas, penyelenggaraan kegiatan seni budaya, serta penerapan praktik usaha wisata yang ramah lingkungan. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kesadaran masyarakat dan wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta konsistensi pelaksanaan program konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator konservasi lingkungan dan budaya menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara optimal. Menurut Junaid et al. (2022), pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan edukasi, pengawasan, serta pelaksanaan program konservasi secara berkelanjutan.
5. Pada indikator kemitraan, Pemerintah Desa Kawali bersama Pokdarwis telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas pariwisata, dan berbagai pihak lainnya melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, promosi, serta pendampingan pengelolaan desa wisata. Namun demikian, kemitraan yang telah terjalin masih perlu diperluas agar mampu meningkatkan pengembangan potensi wisata dan pemberdayaan masyarakat secara lebih optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator kemitraan menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara maksimal. Menurut Gautama et al. (2020), kemitraan yang kuat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata dan keberlanjutan pengembangan destinasi. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperluas kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kawali secara berkelanjutan.
6. Pada indikator diversifikasi pendapatan, Pemerintah Desa Kawali telah berupaya mendorong masyarakat mengembangkan berbagai usaha pendukung desa wisata, seperti UMKM, kuliner, kerajinan, dan jasa wisata yang memanfaatkan potensi lokal. Upaya tersebut telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh tambahan pendapatan dari sektor pariwisata. Namun demikian, pengembangan usaha masyarakat belum berjalan secara optimal karena masih terbatasnya inovasi produk, akses pemasaran, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator diversifikasi pendapatan menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara maksimal. Menurut Gautama et al. (2020), diversifikasi usaha masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan manfaat ekonomi desa wisata. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kawali perlu meningkatkan pembinaan UMKM, memperluas akses pemasaran, serta mengembangkan produk wisata berbasis potensi lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
7. Pada indikator pengembangan infrastruktur berkelanjutan, Pemerintah Desa Kawali telah melakukan pembangunan dan perbaikan sarana pendukung desa wisata, seperti akses jalan, fasilitas umum, area parkir, serta penataan kawasan wisata. Namun demikian, penyediaan

infrastruktur tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengembangan desa wisata karena masih terdapat fasilitas yang perlu ditingkatkan untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator pengembangan infrastruktur berkelanjutan menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara optimal. Menurut Junaid et al. (2022), penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kawali perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wisata secara bertahap dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

8. Pada indikator monitoring dan evaluasi, Pemerintah Desa Kawali bersama Pokdarwis telah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program desa wisata melalui rapat koordinasi serta pemantauan kegiatan yang berlangsung. Namun demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan sehingga masih terdapat beberapa kendala yang belum segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator monitoring dan evaluasi menurut Zitri (2024) belum terlaksana secara maksimal. Menurut Zitri (2024), monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program sekaligus menjadi dasar penyempurnaan pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kawali perlu menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, strategi Pemerintah Desa Kawali dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata telah menunjukkan implementasi pada seluruh indikator Community Based Tourism (CBT), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa melalui pelibatan masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan dan budaya, pembangunan kemitraan, pengembangan usaha masyarakat, penyediaan infrastruktur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan Desa Wisata Kawali. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala, seperti belum meratanya partisipasi masyarakat, terbatasnya inovasi dan pemasaran produk wisata, belum optimalnya kemitraan, serta perlunya peningkatan kualitas infrastruktur dan evaluasi program. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata berbasis Community Based Tourism memerlukan komitmen dan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Desa Kawali dalam pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan desa wisata berdasarkan pendekatan Community Based Tourism (CBT) menurut Zitri (2024) telah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan delapan indikator CBT yang masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya belum meratanya partisipasi masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal, pengembangan kapasitas masyarakat, kemitraan, diversifikasi pendapatan, penyediaan infrastruktur, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar pengembangan desa wisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Desa Kawali diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pengembangan potensi berbasis kearifan lokal, memperluas kemitraan, mengembangkan UMKM, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, pengembangan Desa Wisata Kawali diharapkan dapat berjalan lebih optimal sesuai prinsip Community Based Tourism dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisya', N., Rahmah, D., & Raharjo, T. (2022). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Desa*, 8(3), 145-160.
- Gautama, R., Hidayat, A., & Suryana, T. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 120-134.
- Hapsari, N., & La Patilaiya, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Deepublish Press.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Junaid, M., Nurhayati, E., & Maulana, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat melalui Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan*, 11(1), 33-47.
- Raharjo, T. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa: Prinsip dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
- Rappaport, J. (1995). Empowerment Meets Narrative: Listening to Stories and Creating Settings. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 795-807.
- Yuditha, D., & Iskandar, H. (2024). Model Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan Kampung Angklung Ciamis Menjadi Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 10(2), 199-211.
- Yulianingrum, A., Kurniawati, F., & Lestari, S. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif di Era Digital. Malang: UB Press.
- Zitri, A., Rahman, I., & Prasetyo, R. (2022). Community-Based Tourism: Konsep dan Implementasi dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 14(1), 25-40.